

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KOTA JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**OLEH:**

**IVAN MAULANA AKBAR**

**NIM. 204105020066**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2024**

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KOTA JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**OLEH:**

**IVAN MAULANA AKBAR**  
**NIM. 204105020066**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2024**

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KOTA JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

IVAN MAULANA AKBAR  
NIM. 204105020066



Disetujui Pembimbing,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
AMINATUS ZAHRIYA, S.E, M.SI  
NIP. -198907232019032012

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KOTA JEMBER**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal: 18 November 2024


Tim penguji

**Ketua**



**AGUNG PARMONO, S.E., M.Si**  
NIP: 197512162009121002

**Sekretaris**



**MASHUDI, M.E.I.**  
NUP: 201603134

Anggota :

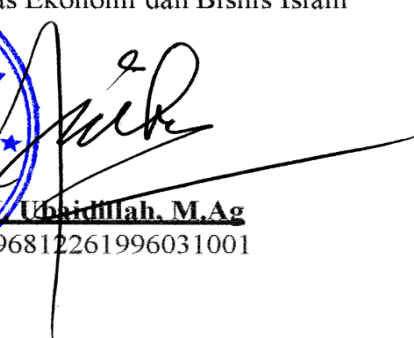
1. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
2. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dean, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag**  
NIP: 196812261996031001

## MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Artinya: "Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. (Q.S. Ar Rahman)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Dan dari hati terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni bapak H. A. Fauzi, S.Sos. M.Si dan juga Ibu Hj. Dian Hanjayani, S.Pd. yang selalu memberikan *support* kepada peneliti.
2. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
3. Putri Elsa Evivita Hersanda, S.Ak yang telah mensupport dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Aminatus Zahriya, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen FEBI UIN KHAS Jember yang telah membrikan ilmu serta pengalamannya yang sangat berguna bagi saya di masa masa yang akan datang.
6. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kenikmatan dan kesehatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jember”** dengan baik dan benar. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tabiin, serta juga pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember guna untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E). Atas selesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang ikut berperan dalam proses penyelesaiannya skripsi ini, berikut ini penulis mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H.Ubaidillah,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajaran Dekanat.
3. Dr. M.F. Hidayatullah,S.H.I.,M.S.I. selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Dr. Sofia, M.E selaku koordinator program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Luluk Musfiroh, M.Ak. selaku dosen pembimbing akademik
6. Aminatus Zahriyah,SE.,M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan Waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar
7. Seluruh dosen dan juga staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu dan pembelajaran dan pengalaman kepada penulis selama proses pendidikan.

8. Keluarga khususnya kedua orang tua tercinta dan Putri Elsa, terimakasih telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik baiknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Perpajakan dan Ekonomi Islam.

Jember, 7 November 2024

Penulis,

Ivan Maulana Akbar

NIM. 204105020066





## ABSTRAK

Ivan Maulana Akbar, Aminatus Zahriyah, 2024: *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jember*

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3) Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 4) Apakah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik kuisioner yang ditentukan secara *accidental sampling* serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember. Penelitian ini menggunakan *SPSS Statistics 17.0* sebagai alat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 3) Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 4) Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional.....	14
G. Hipotesis .....	18
H. Kerangka Konseptual .....	22
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	25
B. Kajian Teori .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41

B. Populasi dan Sampel .....	41
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data .....	49
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	52
D. Pembahasan.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Jember .....	2
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3. 1 Tabel Skala Pengukuran Likert.....	43
Tabel 4. 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisoner.....	49
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden .....	50
Tabel 4. 3 Usia Responden.....	50
Tabel 4. 4 Jenis Pendidikan Responden.....	51
Tabel 4. 5 Pekerjaan Responden .....	51
Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4. 7 Uji Validitas .....	54
Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas .....	55
Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....	55
Tabel 4. 10 Uji Multikolinieritas.....	56
Tabel 4. 11 Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinan .....	57
Tabel 4. 13 Uji Regresi Linier Berganda .....	57
Tabel 4. 14 Uji F.....	59
Tabel 4. 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisoner.....	49
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden .....	50
Tabel 4. 3 Usia Responden.....	50
Tabel 4. 4 Jenis Pendidikan Responden.....	51
Tabel 4. 5 Pekerjaan Responden .....	51

Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4. 7 Uji Validitas .....	54
Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas .....	55
Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....	55
Tabel 4. 10 Uji Multikolinieritas.....	56
Tabel 4. 11 Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinan .....	57
Tabel 4. 13 Uji Regresi Linier Berganda .....	57
Tabel 4. 14 Uji F .....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Pajak merupakan sumber utama bagi perekonomian suatu negara dikarenakan sumber penerimaan negara yang paling potensial khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)<sup>2</sup>.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). PKB merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi<sup>3</sup>. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Kota Jember yang mengalami peningkatan setiap

---

<sup>1</sup> Ana Pratiwi and others, 'Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Atas Perawatan Jasa Cuci Kereta Dan OTC (On Trip Cleaning) Pada PT. KAI Persero Daerah Operasi IX Jember', *Academia.Edu*, 23.PPh 23, 1–10 <<https://www.academia.edu/download/102306495/diki.pdf>>.

<sup>2</sup> Dhania Febby Zahira, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati' (Skripsi, Departemen Bisnis dan Keuangan Universitas Diponegoro Semarang, 2023).

<sup>3</sup> Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, and Steven J. Tangkuman, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7.3 (2019), 4251–60.

tahunnya. Jember dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, karena Jember memiliki potensi ekonomi besar untuk dikembangkan, sebagai kota yang besar dengan populasi penduduk pada tahun 2023 sebesar 2.584.771 jiwa, terbesar ketiga setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Malang<sup>4</sup>.

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Jember

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sepeda Motor	787.131	824.085	854.728
Jeep	5.719	5.848	6.178
Sedan	9.020	9.025	9.109
Colt station	44.720	47.405	50.446
Truck	9.616	9.790	10.178
Colt pick up	11.086	11.654	13.109
Bus	891	915	996
Ambulance	293	319	322
Roda 3	2.085	2.320	3.860
<b>Jumlah</b>	<b>873.561</b>	<b>911.361</b>	<b>948.926</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik<sup>5</sup>

Berdasarkan data diatas, kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2020 seharusnya pemerintah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini. Tetapi dilihat dari data, masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar 54.361.657.894, sedangkan

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 'Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2021-2023' <<https://jatim.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Jumlah+Penduduk+Menurut+Jenis+Kelamin+dan+Kabupaten%2FKota+Provinsi+Jawa+Timur+%28Jiwa%29%2C+2021-2023&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tam>>.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, 'Perkembangan Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Catatan Kepolisian Resort Jember, 2018-2020', 2021 <<https://jemberkab.bps.go.id/indicator/17/64/1/perkembangan-banyaknya-kendaraan-menurut-jenis-kendaraan-berdasarkan-catatan-kepolisian-resort-jember.html>>.

realisasinya sebesar 47.294.155.401 atau 87%<sup>6</sup>. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar lebih tinggi<sup>7</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara konsisten. Jika jumlah kendaraan bermotor meningkat dan tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar sehingga menghambat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>8</sup>.

Dengan kebijakan yang terdapat pada kepatuhan wajib pajak maka teori yang digunakan yaitu teori atribusi yang menjelaskan bahwa mengamati perilaku seorang individu dapat disebabkan dari faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dikendalikan oleh individu itu sendiri sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi faktor dari luar

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, 'Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember', 2021 <<https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/10/27/296/target-dan-realisasi-pendapatan-asli-daerah-pad-di-kabupaten-jember-2020.html>>.

<sup>7</sup> Aprita Tri Nadia, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)', *Journal of Accounting* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>8</sup> Nadia.



sehingga memaksa individu untuk melakukannya<sup>9</sup>. Penentuan penyebab tersebut bergantung kepada 3 faktor, yaitu: Kekhususan yakni apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda, Konsensus yakni jika setiap orang menghadapi situasi yang sama dengan memberikan respons yang sama dan yang terakhir, Konsistensi yakni apakah seorang individu dapat memberikan respon yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Apabila dilihat dari segi konsisten maka semakin konsisten perilakunya maka semakin mungkin dapat diatribusikan pada penyebab internal.

Kepatuhan wajib pajak yang tinggi merupakan tujuan utama yang sangat penting bagi pemerintah dalam upaya pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang terpenting karena kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara<sup>10</sup>. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Ada beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan

---

<sup>9</sup> Nadia.

<sup>10</sup> Ana Pratiwi, Lilis Wahyuningsih, and Shofia Auliya Az, 'Sosialisasi Pelayanan Dan Produk Di Bank Muamalat KCP Banyuwangi', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Lingkungan (JPML)*, 2.1 (2023), 7 <<https://doi.org/10.30587/jpml.v2i1.5686>>.

perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban secara patuh jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban membayar pajak untuk kesejahteraan bersama yang sangat bermanfaat dan dapat dirasakan nantinya. Tidak hanya itu pengetahuan tentang perpajakan juga meliputi pengetahuan tentang fungsi membayar pajak, sistem pemungutan pajak yang berlaku, manfaat dalam membayar pajak, dan sanksi yang diterima apabila tidak patuh dalam membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup berupa fungsi dan tujuan pajak, maka akan menumbuhkan perilaku patuh terhadap pajak<sup>11</sup>.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahira<sup>12</sup>, Kowel et al.<sup>13</sup>, dan Ainiyah<sup>14</sup> menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Nadia<sup>15</sup> yang mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>11</sup> Winny Aprilia Nurita Ujur Agun, Luh Kade Datrini, and A. A. Bagus Amlayasa, 'Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi', *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6.1 (2022), 23–31 <<https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>>.

<sup>12</sup> Zahira.

<sup>13</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

<sup>14</sup> Iin Nur Ainiyah, 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisai Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi' (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda, 2023).

<sup>15</sup> Nadia.

Faktor yang kedua yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya agar tepat waktu dalam membayar pajaknya karena menganggap bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan apabila tidak patuh dalam memenuhinya. Namun banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar. Hal ini dikarenakan tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, diharapkan ketaatan masyarakat akan pembayaran pajak berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang memberikan hasil yang berbeda beda diantaranya penelitian Wahyuningrum<sup>16</sup> yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian penelitian yang dilakukan Iin<sup>17</sup>, Putra<sup>18</sup> dan

---

<sup>16</sup> Putri Zalsa Bella Wahyuningrum, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Semarang)', 2022 (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

<sup>17</sup> Ainiyah.

<sup>18</sup> I Dewa Agung Krisna Putra, 'Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Serta Kebijakan Intensif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar' (Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, 2022).

Trisnayanti et al.<sup>19</sup> yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang ketiga yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan adalah inovasi dalam membayar pajak dengan mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Pemerintah mengimplementasikan pembayaran pajak yang berorientasi langsung kepada wajib pajak untuk memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Unit pelayanan samsat *drive thru* merupakan salah satu inovasi terbaru dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Keunggulan layanan *drive thru* adalah dapat meminimalisir calo yang berkeliaran untuk mengambil keuntungan dari wajib pajak dan dalam pendataan kendaraan bermotor dapat lebih terkontrol. Layanan *drive thru* dibuat untuk mengefisienkan waktu para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus mengantri panjang.

Selain inovasi samsat *drive thru*, penerapan samsat keliling juga memudahkan wajib pajak karena semakin lokasinya yang strategis membuat wajib pajak mudah untuk menjangkau. Inovasi lainnya yaitu dengan menggunakan *e-samsat* dan samsat *corner* yang memudahkan pembayaran karena ada berlokasi di toko yang lokasinya strategis dan proses pembayaran melalui transfer. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika kesulitan melakukan pembayaran

---

<sup>19</sup> Ni Komang Fera Trisnayanti, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati, 'Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan', *Jurnal Kharisma Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 4.1 (2022), 411–19 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4584>>.

pajaknya yang tidak efektif dan efisien dalam pelayanannya terkait sistem administrasi dan prosedur pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kowel et al<sup>20</sup>, Trisnayanti<sup>21</sup> dan Ainiyah<sup>22</sup> menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Zahira<sup>23</sup> yang mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terdapat beberapa wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan dibidang pajak khususnya pengetahuan dasar terkait perpajakan diiringi dengan adanya peraturan perpajakan yang cukup sering berubah yang menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk mengikuti perkembangannya. Pemerintah kerjasama dengan SAMSAT telah berupaya untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dengan menyederhanakan prosedur dalam membayar pajak, seperti dibuatnya aplikasi *e-samsat*, pelayanan samsat *drive thru*, ketersediaan samsat *corner*, dan pengadaan samsat keliling. Selain itu dengan diberlakukannya penghapusan sanksi administratif membuat masyarakat khususnya wajib pajak berbondong-bondong untuk melunasi tunggakan pajaknya dimana berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

---

<sup>20</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

<sup>21</sup> Trisnayanti, Yuesti, and Bhegawati.

<sup>22</sup> Ainiyah.

<sup>23</sup> Zahira.

penelitian yang berjudul pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang jalan yang akan diambil peneliti. Hal ini harus mengacu pada masalah-masalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini mencakup kontribusi dari proses penelitian yang diberikan setelah penyelesaian. Kegunaannya melibatkan aspek teoritis dan praktis, termasuk manfaat bagi peneliti, instansi terkait, dan masyarakat secara keseluruhan. Rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya bukti empiris mengenai pengaruh wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan informasi mengenai topik yang terkait secara luas.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

- 1) Peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember.
- 2) Penelitian yang dilakukan dapat menjadi nilai tambah dalam karir akademik atau profesional peneliti. Publikasi hasil penelitian dapat membuka peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek serupa atau menjadi kontributor di bidang kepatuhan wajib pajak.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk seluruh kegiatan akademik untuk menggali lebih dalam tentang pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor serta dapat mengetahui dampak dari peraturan pajak kendaraan bermotor terhadap pemilik kendaraan bermotor bagi kemajuan negara.



## E. Ruang Lingkup Penelitian

### a. Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)

#### 1) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai kondisi wajib pajak kepemilikan kendaraan bermotor dapat mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat melakukan pembayaran, pelaporan, dan penghitungan pajak<sup>24</sup>. Pengukuran tiap variabel penelitian ini menggunakan 4 indikator yaitu<sup>25</sup>:

- a) Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan
- b) Wajib pajak melapor SPT dengan benar dan tepat waktu
- c) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun
- d) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena pajak

#### 2) Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

##### 1) Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang wajib pajak kendaraan bermotor pahami mengenai perpajakan yang berkaitan dengan perhitungan pajak

<sup>24</sup> Ainiyah.

<sup>25</sup> Afuan Fajrian Putra, 'Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem', *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 7.1 (2020).

terutangnya dan prosedur perpajakan<sup>26</sup>. Pengukuran variabel ini menggunakan 4 indikator yaitu<sup>27</sup>:

- a) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak
- b) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- c) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

## 2) Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah atau memberikan pelajaran untuk wajib pajak kendaraan bermotor yang belum patuh<sup>28</sup>. Pengukuran variabel ini menggunakan 4 indikator yaitu<sup>29</sup>:

- a) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- b) Sanksi administrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan
- c) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

<sup>26</sup> Ainiyah.

<sup>27</sup> Muhammad Sofwan Hidayah, 'Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan' (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>28</sup> Ainiyah.

<sup>29</sup> H Hantono and R. F. S Sianturi, 'Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan', *JAP: Jurnal Audit Dan Perpajakan*, 1.1 (2021), 27–40.

- d) Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi

### 3) Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pembaharuan pada sistem administrasi perpajakan yang disusun oleh pemerintah agar lebih efisien, ekonomis dan memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat digunakan untuk menaikkan kredibilitas demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak<sup>30</sup>. Pengukuran tiap variabel penelitian ini menggunakan 4 indikator yaitu<sup>31</sup>:

- a) Modernisasi sistem perpajakan telah berbasis teknologi informasi
- b) Modernisasi sistem perpajakan efektif dan efisien
- c) Modernisasi sistem administrasi pajak sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak
- d) Modernisasi sistem perpajakan telah memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak

## F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional, peneliti membahas istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian. Berikut ini adalah definisi dari variabel penelitian.

<sup>30</sup> Ainiyah.

<sup>31</sup> Irfani Firlil, 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4.3 (2021).

## 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Saat ini, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana wajib pajak sepenuhnya dapat menjalankan kewajibannya, dimana kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama dalam proses pengelolaan sistem *self assessment*<sup>32</sup>. Kepatuhan dari kata dasar patuh, istilah "patuh" berasal dari frasa yang digunakan oleh KBBI, yang berarti "perintah", "amalan", atau "disiplin".

Kepatuhan pajak adalah tindakan mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak masa dan tahunan masing-masing sesuai ketentuan pajak yang berlaku<sup>33</sup>. Perspektif kepatuhan dikategorikan menjadi 2 yaitu<sup>34</sup>:

- a. Kepatuhan Administrasi berarti kepatuhan pada peraturan administrasi, seperti membayar tepat waktu.
- b. Kepatuhan Teknis berarti wajib pajak telah memenuhi pembayaran pajak secara teknis.

Kepatuhan pajak pada hakikatnya adalah tindakan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Pengetahuan Wajib Pajak

Tingkat dimana wajib pajak memahami dan mempertimbangkan kewajiban perpajakannya dan berkontribusi pada pendapatan pemerintah

---

<sup>32</sup> Ainiyah.

<sup>33</sup> Cristina, 'Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?', 2023.

<sup>34</sup> Afrizal Eko Anggriawan, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Tegal' (FEB, Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

untuk pembangunan nasional untuk mencapai keadilan dan kemakmuran disebut sebagai pengetahuan pajak<sup>35</sup>. Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal dipahami wajib pajak tentang pajak dalam konteks sistem dan prosedur perpajakan<sup>36</sup>. Informasi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pembayaran pajak. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan pajak yang cukup, mereka dapat dengan mudah mematuhi peraturan ini akan menjamin keakuratan kewajiban perpajakannya dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu<sup>37</sup>.

Pengetahuan perpajakan merupakan elemen atau faktor penting dalam kepatuhan pajak, dengan membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak melalui sistem *self-assessment*<sup>38</sup>. Agar berhasil menerapkan sistem *self-assessment* wajib pajak harus dapat memahami dan mengerti informasi yang diberikan yaitu mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, dengan demikian pengetahuan pajak memegang peran penting. Tanpa pengetahuan yang baik, prinsip *self-assessment system* tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan lancar, dan membuat kepatuhan pajak juga akan lemah atau kurang optimal.

---

<sup>35</sup> Ainiyah.

<sup>36</sup> Anggriawan.

<sup>37</sup> Hantono and Sianturi.

<sup>38</sup> Afuan Fajrian Putra.

### 3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak<sup>39</sup>. Sanksi diartikan sebagai hukuman atas pengabaian terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi juga akibat dari perilaku wajib pajak yang tidak wajar<sup>40</sup>. Pengenaan sanksi perpajakan dapat menjadi sarana tambahan hukum perpajakan. Pelanggaran atau kelalaian terkait peraturan perpajakan yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi perpajakan.

### 4. Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan program pengembangan yang sistematis di bidang perpajakan, khususnya di bidang administrasi, yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Modernisasi sistem adalah suatu inovasi atau reformasi bertujuan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya<sup>41</sup>.

Penerapan sistem modernisasi juga cenderung membutuhkan sistem yang mudah diterapkan oleh penggunanya. Penyempurnaan proses administrasi merupakan bagian penting dari program modernisasi, karena teknologi informasi yang ada dapat digunakan untuk pelayanan yang

---

<sup>39</sup> Ainiyah.

<sup>40</sup> Afuan Fajrian Putra.

<sup>41</sup> Afuan Fajrian Putra.

lebih baik, nyaman, efisien dan sederhana sehingga wajib pajak tidak merasa rumit dalam membayar pajak<sup>42</sup>.

Saat ini Ditjen Pajak sudah banyak mengembangkan modernisasi sistem, antara lain *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment* dan kemampuan daftar NPWP secara online. Wajib Pajak seharusnya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara online dengan mudah dan dimana saja, tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan tujuan dari modernisasi sistem<sup>43</sup>.

## G. Hipotesis

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu elemen terpenting dalam sistem hukum perpajakan adalah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap perilaku wajib pajak dalam sistem *self-assessment*. Karena penerapan sistem penilaian mandiri yang menyeluruh memerlukan kemampuan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, prinsip dasar sistem *self-assessment* tidak akan berfungsi secara efektif<sup>44</sup>. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan memiliki pengetahuan yang mendasar tentang fungsi pajak, macam-macam pajak, syarat perpajakan, sampai dengan mekanisme pembayaran pajak.

---

<sup>42</sup> Ana Pratiwi, Kuni Zakkiyyatul Laila, and Daru Anondo, 'Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2.1 (2022), 60–71 <<https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3313>>.

<sup>43</sup> Ainiyah.

<sup>44</sup> Ainiyah.

Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang mendasar, maka di khawatirkan adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak yang cenderung mengakibatkan kewajiban perpajakannya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Zahira<sup>45</sup>, Kowel et al.<sup>46</sup>, dan Ainiyah<sup>47</sup> yang hasilnya pengetahuan wajib pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya, selain paham mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak juga harus diberlakukan secara tegas. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban membayar pajak karena dirasa akan merugikan apabila tidak patuh. Sanksi ialah hukuman atas pelanggaran atau akibat dari melakukan ketidakpatuhan dan tidak taat atas aturan yang berlaku. Dalam perpajakan adanya sanksi pajak dapat dijadikan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak<sup>48</sup>.

Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak selain yang terlambat menyelesaikan kewajibannya juga diberikan kepada wajib pajak yang melaporkan pajak terutangya secara tidak benar sesuai dengan

---

<sup>45</sup> Zahira.

<sup>46</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

<sup>47</sup> Ainiyah.

<sup>48</sup> Afuan Fajrian Putra.



jumlah yang seharusnya. Sanksi yang tegas akan memberikan efek bagi wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya, namun apabila sanksi pajak yang dikenakan relatif kecil, maka akan cenderung mengabaikan<sup>49</sup>. Oleh karena itu sanksi perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan Iin<sup>50</sup>, Putra<sup>51</sup> dan Trisnayanti et al.<sup>52</sup>.

H<sub>2</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi sistem administrasi merupakan salah satu inovasi pembaharuan yang dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya<sup>53</sup>. Sistem administrasi merupakan langkah awal bagi wajib pajak untuk mempermudah dalam melaksanakan pembayaran pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dan takut adanya sanksi pajak apabila tidak dipatuhi, maka modernisasi sistem administrasi perpajakan ini akan mempermudah wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mengharapkan kantor pajak menyediakan sistem administrasi yang mudah dilalui oleh wajib pajak. Sistem administrasi yang baik akan membuat wajib pajak mudah mengerti dalam melakukan proses pembayaran pajak, sehingga wajib

---

<sup>49</sup> Ainiyah.

<sup>50</sup> Ainiyah.

<sup>51</sup> I Dewa Agung Krisna Putra.

<sup>52</sup> Trisnayanti, Yuesti, and Bhegawati.

<sup>53</sup> Ainiyah.

pajak tidak merasa membuang waktu mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Di zaman yang serba modern ini para wajib pajak mengharapkan kantor pajak memodernisasikan sistem administrasi perpajakan dengan cara membuat metode pembayaran pajak dengan teknologi yang ada seperti *e-samsat*, *samsat corner*, *samsat drive thru* dan *samsat keliling*<sup>54</sup>. Semakin modern sistem administrasi perpajakan yang ada maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Kowel et al<sup>55</sup>, Trisnayanti<sup>56</sup> dan Ainiyah<sup>57</sup>.

H<sub>3</sub>: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai undang-undang,

<sup>54</sup> Nikmatul Masruroh and others, 'Literasi Sistem Tranformasi Digital Dalam Optimalisasi Layanan Nasabah', *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2.1 (2024), 406–12 <<https://doi.org/10.62085/jms.v2i1.88>>.

<sup>55</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

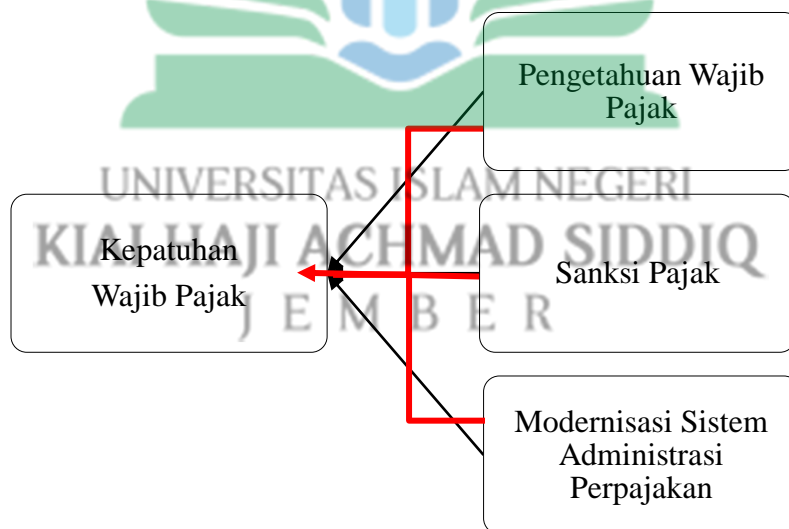
<sup>56</sup> Trisnayanti, Yuesti, and Bhegawati.

<sup>57</sup> Ainiyah.

hukum, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Wajib pajak akan melaksanakan dan melakukan kewajiban maupun hak perpajakannya apabila mereka sudah mengetahui tentang perpajakan maka kesadaran membayar pajak akan tumbuh didalam diri seseorang untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar perpajakannya, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak<sup>58</sup>.

H<sub>4</sub>: Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### H. Kerangka Konseptual



#### I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berisi 5 (lima) bab, yaitu dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini lebih teratur dan sistematis. Adapun beberapa sistematika penelitian sebagai berikut:

<sup>58</sup> Nadia.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis akan menggambarkan beberapa mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian berupa : Konsep Teori, Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang kerangka berpikir yang secara otoritis menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data dan analisis data.

## BAB IV PENYAJIAN DATA

Pada bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis serta pembahasan dan hasil yang akan menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember.

## BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya kepada pihak yang terkait. Kesimpulan dari hasil penelitian ini berisikan poin-poin inti dari analisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel pembahasan peneliti saat ini, diantaranya:

1. **Iin Nur Ainiyah** *“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”*<sup>59</sup>. Skala Likert digunakan untuk mengukur data kuantitatif dari sumber primer dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu memoderasi dampak pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak

---

<sup>59</sup> Ainiyah.

berpengaruh terhadap dampak modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. **Dhania Febby Zahira** *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati<sup>60</sup>”*. Data dari penelitian ini bersifat kuantitatif. Berdasarkan temuan penelitian, (1) kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (2) pengetahuan wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan (3) kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap modernisasi administrasi perpajakan.
3. **Ni Komang Fera Trisnayanti, Anik Yuesti dan Desak Ayu Sriary Bhegawati** *“Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan<sup>61</sup>”*. Ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan koefisien regresi sebesar 0,312 dan sig 0,001, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,191 dan sig 0,011. (3) Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap pengelolaan perpajakan yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,443 dan sig 0,021. (4) apabila koefisien

---

<sup>60</sup> Zahira.

<sup>61</sup> Trisnayanti, Yuesti, and Bhegawati.

regresi sebesar 0,196 dan sig 0,006 maka sistem administrasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. (5) Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi positif signifikan oleh akuntabilitas pelayanan publik, dengan koefisien regresi sebesar 0,238 dan tingkat signifikansi sebesar 0,006.

4. **Putri Zalsa Bella Wahyuningrum** *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang)”*<sup>62</sup>. Dalam penelitian ini, metodologi kuantitatif digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pengetahuan wajib pajak. (2) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. (3) Sanksi perpajakan tidak mempunyai dampak yang berarti dan bermanfaat terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Sistem Administrasi Perpajakan memberikan dampak yang baik dan patut diperhatikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh yang baik dan besar Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. **I Dewa Agung Krisna Putra** *“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, serta Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan*

---

<sup>62</sup> Wahyuningrum.



*Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar*”<sup>63</sup>. Menggunakan penelitian kuantitatif. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan insentif perpajakan, menurut temuan penelitian. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terkena dampak negatif dan negatif dari modernisasi perpajakan.

6. **Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani** *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar*”<sup>64</sup>. Penelitian kuantitatif digunakan dalam analisis ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar, namun pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
7. **Juvita Dwi Herawati dan Shandy Marsono** *“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus*

<sup>63</sup> I Dewa Agung Krisna Putra.

<sup>64</sup> Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar’, *Jurnal Kharisma*, 3.1 (2021), 128–39.

*pada Samsat Klaten)*<sup>65</sup>. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh negatif dan kecil terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

8. **Febiana, Hestin Sri Widiawati, dan Andy Kurniawan** *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri”*<sup>66</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) secara parsial akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) secara parsial modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (4) secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

<sup>65</sup> Juvita Dwi Herawati and Shandy Marsono, ‘Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Klaten)’, *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2020), 99–109 <<https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/776>>.

<sup>66</sup> Febiana, Hestin Sri Widiawati, and Andy Kurniawan, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri’, *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5.3 (2020), 1–12.

9. **Aprita Tri Nadia** *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung)”*<sup>67</sup>. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kuesioner yang dipilih melalui sampling aksidental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB, dengan hasil uji T menunjukkan signifikansi di bawah 0,05. Sebaliknya variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau sebesar 0,984.
10. **Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, dan Steven J. Tangkuman** *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan”*<sup>68</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. Samsat Minahasa Selatan sebaiknya meningkatkan layanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi

---

<sup>67</sup> Nadia.

<sup>68</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Iin Nur Ainiyah (2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu objek penelitian pada UMKM, menggunakan variabel moderasi sosialisasi perpajakan, dan metode analisis PLS-SEM.
2.	Dhania Febby Zahira (2023)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda, menggunakan variabel independen pengetahuan wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan, serta variabel	Perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independen kesadaran wajib pajak dan objek penelitian di Kabupaten Pati.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	
3.	Ni Komang Fera Trisnayanti, Anik Yuesti dan Desak Ayu Sriary Bhegawati (2022)	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda, variabel independen menggunakan sanksi pajak serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan kesadaran, manajemen pajak, administrasi pajak dan akuntabilitas publik serta objek penelitian di KPP Pratama Tabanan.
4.	Putri Zalsa Bella Wahyuningrum (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang)	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer, variabel independen menggunakan pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem administrasi perpajakan serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dan objek penelitian di SAMSAT Kota Semarang.
5.	I Dewa Agung Krisna Putra	Pengaruh Penerapan Sistem	Persamaan pada penelitian ini	Perbedaan pada penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2022)	Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, serta Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar	adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan variabel sistem administrasi perpajakan modern dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	ini yaitu variabel independen menggunakan sosialisasi perpajakan dan kebijakan intensif pajak kendaraan bermotor serta objek penelitian di Kota Denpasar.
6.	Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda, variabel independen menggunakan sanksi pajak dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sosialisasi pajak serta objek penelitian di kantor Samsat Gianyar.
7.	Juvita Dwi Herawati dan Shandy Marsono (2020)	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Samsat Klaten)	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik <i>accidental sampling</i> , variabel independen menggunakan sanksi pajak	Perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independen reformasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta objek penelitian di Samsat Klaten.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	
8.	Febiana, Hestin Sri Widiawati, dan Andy Kurniawan (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal, variabel independen modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independen kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik serta objek penelitian di Kantor Samsat Kota Kediri.
9.	Aprita Tri Nadia (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung)	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik <i>accidental sampling</i> , variabel independen menggunakan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independen menggunakan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak serta objek penelitian di Kantor Samsat Bandar Lampung.
10.	Viva A. A. Kowel, Lintje	Pengaruh Pengetahuan Wajib	Persamaan pada penelitian ini	Perbedaan pada penelitian



No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Kalangi, dan Steven J. Tangkuman (2019)	Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode <i>accidental sampling</i> , variabel independen menggunakan pengetahuan wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	ini yaitu variabel independen menggunakan kesadaran wajib pajak dan objek penelitian di Kabupaten Minahasa.

Sumber: dari berbagai sumber penelitian, diolah 2024

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### 1. Teori Atribusi

Cara kita menilai seseorang didasarkan pada teori atribusi, memahami mengapa seseorang berperilaku seperti itu dengan mendeskripsikan dan merasakan perilakunya<sup>69</sup>. Teori ini berupaya untuk mengetahui apakah faktor eksternal seperti kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan serta faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran wajib

<sup>69</sup> Steppen P. Robbins and Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta Salemba Empat, 2008) <<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=101879&pRegionCode=UNTAR&pClientId=650>>.



pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor<sup>70</sup>.

Pengaruh internal dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam menjalani hidupnya, maka pengaruh tersebut diberi bobot lebih dalam teori ini ketika membahas ciri-ciri kepribadian. Dalam keadaan seperti ini, seorang wajib pajak perlu memahami dan sadar akan tanggung jawab pembayaran pajaknya. Di sini yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah perilaku yang didorong oleh hati nurani yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Pemerintah harus melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan masyarakat membayar pajaknya, bahkan dapat melakukan tindakan paksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini didasarkan pada keadaan eksternal<sup>71</sup>.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya disebut dengan kepatuhan pajak<sup>72</sup>. Kondisi perpajakan yang mendorong wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam perpajakannya memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan menjamin bahwa tanggung jawab perpajakan adalah jujur karena wajib pajak, bukan

---

<sup>70</sup> Nadia.

<sup>71</sup> Nadia.

<sup>72</sup> Sri Kurnia Rahayu, *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

otoritas pajak yang bertindak sebagai pemungut pajak, yang melakukan sebagian besar pekerjaan dalam memenuhi komitmen perpajakan

Sebagai seorang wajib, masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sendiri, meskipun seseorang wajib pajak akan memiliki hak hukum untuk menggunakan undang-undang perpajakan. Hal tersebut, berarti masyarakat masih mengikuti peraturan hukum<sup>73</sup>. Kepatuhan wajib pajak telah menjadi peranan penting mengingat sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia sekarang ini yaitu *self assessment system* yang mana proses ini secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

### 3. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui dan segala yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami manfaat tentang perpajakan dan peraturan tentang perpajakan berdasarkan Undang-undang tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak<sup>74</sup>.

Pengetahuan wajib pajak adalah segala informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib

---

<sup>73</sup> Wahyuningrum.

<sup>74</sup> Siti kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017).

pajak dalam membayar kendaraan bermotor. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diperoleh maka wajib pajak akan semakin memahami kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima jika melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mengakibatkan wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu. Semua pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang undang-undang dan proses perpajakan disebut sebagai pengetahuan wajib pajak. Terdapat hubungan positif antara kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor dengan tingkat pengetahuannya. Wajib Pajak akan membayar pajaknya tepat waktu dan tanpa tekanan jika mereka lebih memahami kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan mereka terima jika tidak memenuhinya sesuai undang-undang<sup>75</sup>.

#### 4. Sanksi Pajak

Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebut dengan norma perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai efek jera untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan<sup>76</sup>. Sanksi perpajakan dikenakan karena melanggar batasan undang-undang perpajakan, semakin banyak ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak maka semakin berat pula hukumannya<sup>77</sup>.

Dengan mengajukan sanksi, diharapkan wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya akan merasa patah semangat dan

<sup>75</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

<sup>76</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).

<sup>77</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008).

termotivasi untuk belajar dari kesalahannya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya pada masa pajak mendatang. Oleh karena itu, sanksi dimaksudkan sebagai hukuman positif. mungkin lebih baik juga. Jika wajib pajak dikenakan sanksi karena kecerobohnya, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan menghadapi sanksi jika mereka melakukan kegiatan curang atau dengan sengaja ceroboh dalam mempertahankan komitmen perpajakannya.

#### 5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat<sup>78</sup>. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan program reformasi administrasi perpajakan sejak tahun 2002. Upaya ini dikenal dengan Modernisasi. Reformasi modernisasi pada hakikatnya adalah perpajakan atau revolusi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu modifikasi yang akan mempengaruhi pelayanan yang diterima wajib pajak. Salah satu pengertian modernisasi perpajakan adalah pemanfaatan prasarana dan sarana perpajakan baru dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>79</sup>.

Dengan memanfaatkan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan modern, modernisasi sistem perpajakan mencakup

---

<sup>78</sup> Suparman, *Gaya Mengajar Yang Menyenangkan Siswa* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010).

<sup>79</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel<sup>80</sup>. Desain dan implementasi program ini sangat teliti dan komprehensif. Teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, prosedur bisnis, dan struktur organisasi semuanya telah mengalami modifikasi. Penciptaan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang berkembang menjadi Sistem Administrasi Terpadu (SAPT) dan layanan berbasis *e-system* lainnya merupakan contoh bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan juga mendukung kemajuan teknis terkini. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengajukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tentu saja menjadi tujuan diciptakannya sistem tersebut.



---

<sup>80</sup> Pratiwi and others.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang penjabarannya lebih fokus pada data numerikal (angka) yang diolah menggunakan metode statistika<sup>81</sup>.

Jenis penelitian ini menggunakan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih<sup>82</sup>. Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dan memenuhi karakteristik tertentu<sup>83</sup>. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Jember.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *accidental sampling*, merupakan teknik pemilihan

---

<sup>81</sup> Wahyuningrum.

<sup>82</sup> Syaiful Bahri, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ed. by Erang Risanto (Malang: Penerbit Andi, 2018).

<sup>83</sup> Bahri.

sampel berdasarkan kebetulan saja<sup>84</sup>. Penarikan sampel menggunakan rumus slovin karena jumlah populasi telah diketahui, berikut rumusnya:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

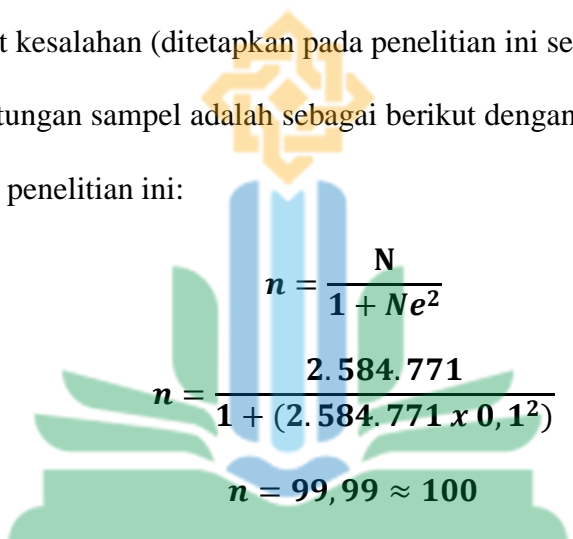
Keterangan:

$n$  : Total sampel

$N$  : Jumlah populasi

$e$  : Tingkat kesalahan (ditetapkan pada penelitian ini sebesar 10%)

Perhitungan sampel adalah sebagai berikut dengan menggunakan rumus slovin pada penelitian ini:



$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{2.584.771}{1 + (2.584.771 \times 0,1^2)}$$

$$n = 99,99 \approx 100$$

Menurut hasil perhitungan tersebut, jumlah masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember pada tahun 2023 adalah 2.584.771 orang<sup>85</sup>. Sehingga minimal sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 100 responden dengan batasan kesalahan 10%.

### C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuisioner, yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab<sup>86</sup>. Berikut opsi jawaban

<sup>84</sup> Bahri.

<sup>85</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

<sup>86</sup> Bahri.

yang terdiri dari 5 (lima) dan masing-masing mempunyai nilai yang berbeda, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Skala Pengukuran Likert

Jawaban	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

#### D. Analisis Data

##### 1. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif atau statistika deduktif mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu riset. Deskriptif digunakan untuk standar deviasi, nilai rata-rata, nilai minimum, dan maksimum<sup>87</sup>.

##### 2. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen<sup>88</sup>. Butir-butir pertanyaan dalam kuisioner merupakan instrumen (alat) ukur yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian sehingga tiap butir pertanyaan dalam kuisioner harus diukur validasinya<sup>89</sup>. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi, sedangkan instrumen yang kurang valid

<sup>87</sup> Bahri.

<sup>88</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

<sup>89</sup> Bahri.



berarti memiliki rendah<sup>90</sup>. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel. Hasilnya, item dikatakan valid jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, sedangkan item dikatakan tidak valid jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel.

### 3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan kuisioner. Tujuannya adalah untuk menilai apakah pengukuran yang digunakan tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha* untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara butir-butir item dalam alat ukur. Nilai *Cronbach Alpha* berkisar antara 0,00 hingga 1,00. Semakin dekat nilai *Cronbach Alpha* dengan 1, maka semakin tinggi koefisien reliabilitas<sup>91</sup>. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha*-nya lebih dari 0,6, sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha*-nya kurang dari 0,6 berarti tidak reliabel.

### 4. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi suatu masalah<sup>92</sup>.

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya dibawah kurva normal atau tidak.

<sup>90</sup> Tukiran, Taniredja, and Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>91</sup> Bahri.

<sup>92</sup> Bahri.

Untuk mengetahui apakah suatu data normal atau tidak secara statistik maka dilakukan uji normalitas menurut *Kolmogorov-smirnov* atau analisis grafik, pengujian ini menggunakan uji *One-sample Kolmogorov-Smirnov*. Uji *One-sample Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poisson*, *uniform* atau *exponential*. Pedoman pengambilan keputusan yaitu<sup>93</sup>:

- a) Nilai sig < 0,05, distribusi data adalah tidak normal
  - b) Nilai sig > 0,05, distribusi data adalah normal
- 2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui suatu model regresi apakah mengalami gejala multikolonieritas dapat dilihat pada *nilai variance inflation factor* (VIF). Jika hasil perhitungan nilai VIF <10 maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolonieritas<sup>94</sup>.

- 3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui uji statistik dengan menggunakan metode *Spershman's rho*. Korelasi *Spershman's rho*

---

<sup>93</sup> Bahri.

<sup>94</sup> Bahri.

adalah mengolerasikan variabel independen dengan residualnya. Nilai signifikansi (sig 2 tail) > 0,05 maka terbebas dari heteroskedastisitas<sup>95</sup>.

#### 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya tingkat ketepatan garis regresi berganda mencocokkan data yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara nol dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Koefisien yang memiliki desteminasi sama dengan nol maka dapat diartikan bahwa variabel independen tidak dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen, jika besarnya koefisien destirminasi mendekati angka 1 maka variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen<sup>96</sup>.

#### 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan analisis yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen,

---

<sup>95</sup> Bahri.

<sup>96</sup> Bahri.

yang bertujuan untuk mengukur intensitas hubungan dua variabel lebih<sup>97</sup>.

Dinyatakan sebagai berikut:

$$Y : \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan wajib pajak
$\alpha$	: Nilai konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien regresi
$X_1$	: Pengetahuan wajib pajak
$X_2$	: Sanksi pajak
$X_3$	: Administrasi perpajakan
e	: Tingkat kesalahan

#### 7. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t digunakan untuk pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen<sup>98</sup>.

Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Signifikansi  $> 0,1$  maka  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Nilai Signifikansi  $< 0,1$  maka  $H_1$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 8. Uji Fisher (Uji F)

Uji statistik F merupakan uji simultan (keseluruhan atau bersama-sama). Uji simultan untuk menguji apakah variabel independen

<sup>97</sup> Bahri.

<sup>98</sup> Bahri.

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen<sup>99</sup>. Kriteria pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Signifikansi  $> 0,1$  maka  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Nilai Signifikansi  $< 0,1$  maka  $H_1$  diterima, artinya variabel independen secara serentak dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.



---

<sup>99</sup> Bahri.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian didasarkan pada data primer yang diperoleh dari kuisoner yang disebarakan kepada responden dengan menggunakan *google form*. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember yang menjadi subyek pada penelitian ini. Kuisoner telah diisi oleh responden sebanyak 100 kuisoner, dengan jumlah minimal responden sebanyak 100 kuisoner. Jumlah sampel yang dapat diolah sebanyak 100 kuisoner.

Berikut merupakan ringkasan pengiriman dan pengembalian yang akan ditunjukkan pada table berikut ini:

**Tabel 4. 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisoner**

Kuisoner	Jumlah Responden
Target	100
Kuisoner yang diisi	100
Kuisoner yang dapat diolah	100

Sumber: Data diolah, 2024

#### B. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan yang dibuat dalam kuisoner untuk setiap indikator dan memudahkan dalam membuat analisis data.

##### 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan 100 responden yang mengisi kuisoner, jenis kelamin responden terbagi menjadi laki-laki dan perempuan, 42 orang laki-laki atau 42%, dan 58 orang perempuan atau 58%.

**Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	42	42%
Perempuan	58	58%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2024

## 2. Umur Responden

Berdasarkan 100 responden yang mengisi kuisioner, adapun usia responden terbagi menjadi 17-24 tahun, 25-34 tahun, 35-49 tahun, dan >50 tahun. Responden dengan usia 17-24 tahun sebanyak 63 responden atau 63%, usia 25-34 tahun sebanyak 23 responden atau 23%, usia 35-49 tahun sebanyak 10 responden atau 10%, dan usia >50 tahun sebanyak 4 responden atau 4%.

**Tabel 4. 3 Usia Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
17-24 tahun	63	63%
25-34 tahun	23	23%
35-49 tahun	10	10%
>50 tahun	4	4%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2024

## 3. Jenis Pendidikan Responden

Berdasarkan 100 responden, adapun pendidikan terakhir responden terbagi menjadi SMA/SMK, D4/S1, dan S2. Total responden untuk pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 24 responden atau 24%, D4/S1 sebanyak 67 responden atau 67%, dan S2 sebanyak 9 responden atau 9%.

**Tabel 4. 4 Jenis Pendidikan Responden**

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA/SMK	24	24%
D4/S1	67	67%
S2	9	9%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2024

#### 4. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan 100 responden, jenis pekerjaan responden terbagi menjadi Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan Lainnya. Total responden Pelajar/Mahasiswa sebanyak 53 responden atau 53%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 responden atau 10%, Pegawai Swasta sebanyak 10 responden atau 10%, Wiraswasta sebanyak 6 responden atau 6%, dan Lainnya sebanyak 21 responden atau 21%.

**Tabel 4. 5 Pekerjaan Responden**

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	53	53%
Pegawai Negeri Sipil	10	10%
Pegawai Swasta	10	10%
Wiraswasta	6	6%
Lainnya	21	21%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2024



## C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

### 1. Statistik Deskriptif

**Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Wajib Pajak	100	1	5	3.87	0.505
Pengetahuan Wajib Pajak	100	1	5	3.59	0.781
Sanksi Pajak	100	1	5	4.02	0.648
Modernisasi Administrasi Perpajakan	100	1	5	4.18	0.649
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Lampiran I SPSS diolah, 2024

Dari hasil analisis data diatas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Kewajiban Wajib Pajak (Y) bernilai minimal 1, artinya 1 dipilih oleh seluruh responden yang memberikan penilaian Kepatuhan Wajib Pajak paling rendah. Dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi terhadap kewajiban Wajib Pajak, nilai maksimalnya adalah 5, artinya adalah 1. Dari seluruh responden yang menjawab pertanyaan Kewajiban Wajib Pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,87 yang merupakan nilai rata-rata Wajib Pajak. Kewajiban. Sebaliknya standar deviasi sebesar 0,505 menunjukkan terdapat 0,505 dari 100 sebaran tanggapan pada variabel Kewajiban Wajib Pajak.
- b. Nilai minimal Pengetahuan Wajib Pajak (X1) adalah 1, hal ini menunjukkan bahwa diantara seluruh responden, estimasi Pengetahuan Wajib Pajak yang paling rendah adalah 1. Nilai maksimalnya adalah 5, artinya dari seluruh responden terdapat lima

orang yang memberikan nilai tertinggi untuk Pengetahuan Wajib Pajak (X1). pengetahuan yang tidak dibayar. Dari seluruh responden yang menjawab pertanyaan Pengetahuan Wajib Pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,59 yang merupakan nilai rata-rata pertanyaan. Sebaliknya, standar deviasi sebesar 0,781 menunjukkan bahwa dari 100 responden, sebaran data variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,781.

- c. Nilai terendah 1 untuk Sanksi Pajak (X2) menunjukkan bahwa dari seluruh responden, penilaian sanksi perpajakan terendah adalah 1. Dengan penilaian maksimal 5, maka seluruh responden yang memberikan penilaian Sanksi Pajak tertinggi memberikan penilaian tertinggi. Dari seluruh responden yang menjawab pertanyaan Sanksi Pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,02 yang merupakan nilai rata-rata pertanyaan. Sedangkan sebaran data variabel Sanksi Pajak sebesar 0,648 dari 100 responden dengan standar deviasi sebesar 0,648.
- d. Jawaban Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) adalah 1, artinya dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling rendah, inilah jawaban yang nilai minimalnya 1. Dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi terhadap modernisasi, nilai maksimalnya adalah 5. Sistem Administrasi Perpajakan adalah 5.0. Dari seluruh responden yang menjawab survei Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, rata-rata

responden memberikan penilaian sebesar 4,18 yang merupakan rata-rata skor Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Sebaliknya, standar deviasi sebesar 0,649 menunjukkan bahwa dari 100 responden, variasi data variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,649.

## 2. Uji Validitas

**Tabel 4. 7 Uji Validitas**

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,732	0,196	Valid
	Y.2	0,588	0,196	Valid
	Y.3	0,741	0,196	Valid
	Y.4	0,681	0,196	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,584	0,196	Valid
	X1.2	0,648	0,196	Valid
	X1.3	0,491	0,196	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,690	0,196	Valid
	X2.2	0,583	0,196	Valid
	X2.3	0,686	0,196	Valid
	X2.4	0,624	0,196	Valid
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,668	0,196	Valid
	X3.2	0,689	0,196	Valid
	X3.3	0,690	0,196	Valid
	X3.4	0,681	0,196	Valid

Sumber: Data Lampiran II SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi *pearson correlation* lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,192 ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

### 3. Uji Reliabilitas

**Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kewajiban Wajib Pajak	0,810	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	0,790	Reliabel
Sanksi Pajak	0,748	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,767	Reliabel

Sumber: Data Lampiran III SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrument untuk penelitian selanjutnya.

### 4. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

**Tabel 4. 9 Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.62489630
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.067
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.704
Asymp. Sig. (2-tailed)		.705

Sumber: Data Lampiran IV SPSS diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai probabilitasnya yaitu 0,705 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

## b. Uji Multikolonieritas

**Tabel 4. 10 Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Wajib Pajak	.589	1.697
	Sanksi Pajak	.496	2.017
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.580	1.725

Sumber: Data Lampiran V SPSS diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa tolerance dan VIF dari variabel Pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar 0.589 dan 1.697, untuk variabel Sanksi Pajak adalah sebesar 0.496 dan 2.017, sedangkan untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebesar 0.580 dan 1.725. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10.

## c. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. 11 Uji Heteroskedastisitas**

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pengetahuan Wajib Pajak	Correlation Coefficient	-.006
		Sig. (2-tailed)	.953
		N	100
	Sanksi Pajak	Correlation Coefficient	-.132
		Sig. (2-tailed)	.189
		N	100
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Correlation Coefficient	-.163
		Sig. (2-tailed)	.106
		N	100

Sumber: Data Lampiran VI SPSS diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas, diperoleh hasil signifikansi Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,953, Sanksi Pajak sebesar 0,189 dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 0,106 yang lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikansi lebih dari 0,5.

#### 5. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

**Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 <sup>a</sup>	.355	.334	1.65009

Sumber: Data Lampiran VII SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai R Square sebesar 0,355 hal ini berarti Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 35,5%, sedangkan sisanya 64,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

#### 6. Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. 13 Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.105	1.177		6.035	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	.103	.092	.119	1.114	.268
	Sanksi Pajak	.187	.091	.233	1.998	.049
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.261	.084	.336	3.120	.002

Sumber: Data Lampiran VIII SPSS diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 7.105 + 0.103X_1 + 0.187X_2 + 0.261X_3 + 0,1$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 7.105 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 7.105 satuan.
- b. Koefisien variabel Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0.103 berarti setiap kenaikan variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0.103 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
- c. Koefisien variabel Sanksi Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0.187 berarti setiap kenaikan variabel Sanksi Pajak sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0.187 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
- d. Koefisien variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0.261 berarti setiap kenaikan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0.261 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

## 7. Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut:

- a. Pengetahuan wajib pajak dengan nilai signifikansi  $0,268 > 0,1$ , hal ini menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.
- b. Sanksi pajak dengan nilai signifikansi  $0,049 < 0,1$ , hal ini menunjukkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.
- c. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,1$ , hal ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

## 8. Uji F

Tabel 4. 14 Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143.601	3	47.867	17.580	.000 <sup>a</sup>
	Residual	261.389	96	2.723		
	Total	404.990	99			

Sumber: Data Lampiran XI SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi  $0,000 < 0,1$  berarti bahwa seluruh variabel independen yaitu,



pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

#### D. Pembahasan

##### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pertama diterima. Alasan utama mengapa wajib pajak lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan dibandingkan mereka yang tidak menyadarinya adalah pemahaman mereka tentang peraturan dan cara mematuhi. Hal ini tergantung pada informasi dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing wajib pajak, kepatuhan pajak dapat terpengaruh jika wajib pajak tidak mengetahui manfaat yang diterimanya dan cara melaporkan pajak<sup>100</sup>.

Tindakan Wajib Pajak sendiri yang tidak mengetahui dan tidak berpengalaman dalam proses pelaporan Wajib Pajak mulai dari penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan, berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak menurut teori atribusi. Oleh karena itu, prinsip *self assessment* tidak dapat diterapkan. Penelitian ini sejalan dengan Zahira<sup>101</sup>, Kowel et al.<sup>102</sup>, dan Ainiyah<sup>103</sup> menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>100</sup> Ainiyah.

<sup>101</sup> Zahira.

<sup>102</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

<sup>103</sup> Ainiyah.

## 2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua diterima. Pada kenyataannya, sanksi pajak pada umumnya sangat minim, sehingga kepatuhan wajib pajak sulit dicapai. Namun, hal tersebut merupakan mekanisme pencegahan untuk memastikan bahwa pajak wajib tidak melanggar aturan perpajakan<sup>104</sup>.

Dalam teori atribusi, sanksi pajak dapat meningkatkan perilaku patuh dalam membayar pajak. Namun, hal ini sejalan dengan hasil analisis bahwa sanksi pajak yang diharapkan dapat meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Hal ini selaras dengan temuan Iin<sup>105</sup>, Putra<sup>106</sup> dan Trisnayanti et al.<sup>107</sup> yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>104</sup> Wahyuningrum.

<sup>105</sup> Ainiyah.

<sup>106</sup> I Dewa Agung Krisna Putra, 'Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Serta Kebijakan Intensif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar' (Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, 2022).

<sup>107</sup> Ni Komang Fera Trisnayanti, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati, 'Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan', *Jurnal Kharisma Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 4.1 (2022), 411–19 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4584>>.

### 3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga diterima, hasil analisis data menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, maka modernisasi sistem administrasi perpajakan seharusnya dapat mempermudah dalam melaksanakan pembayaran pajak<sup>108</sup>.

Namun, wajib pajak sering kali tidak memahami perkembangan sistem pembayaran pajak, sehingga membuat wajib pajak kebingungan, dan menyebabkan tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Apabila wajib pajak sudah memahami akan modernisasi pembayaran pajak yang sangat mudah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perilaku patuh ini sesuai dengan teori atribusi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kowel et al<sup>109</sup>, Trisnayanti<sup>110</sup> dan Ainiyah<sup>111</sup> yang mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

<sup>108</sup> Wahyuningrum.

<sup>109</sup> Kowel, Kalangi, and Tangkuman.

<sup>110</sup> Trisnayanti, Yuesti, and Bhegawati.

<sup>111</sup> Ainiyah.

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan**

Hipotesis keempat diterima, hasil analisis data menunjukkan pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah mengetahui dan memahami mengenai perpajakan dan diperkuat kepatuhannya dalam membayar pajak dengan adanya sanksi pajak. Kemudian, dipermudah pembayarannya dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang terpenting karena kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember.
2. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember.
3. Pengujian pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jember.
4. Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jember.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti kebijakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, and A. A. Bagus Amlayasa, 'Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi', *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6.1 (2022), 23–31 <<https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>>
- Ainiyah, Iin Nur, 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisai Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi' (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda, 2023)
- Anggriawan, Afrizal Eko, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Tegal' (FEB, Universitas Pancasakti Tegal, 2020)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Badan Pusat Statistik, 'Perkembangan Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Catatan Kepolisian Resort Jember, 2018-2020', 2021 <<https://jemberkab.bps.go.id/indicator/17/64/1/perkembangan-banyaknya-kendaraan-menurut-jenis-kendaraan-berdasarkan-catatan-kepolisian-resort-jember.html>>
- , 'Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember', 2021 <<https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/10/27/296/target-dan-realisasi-pendapatan-asli-daerah-pad-di-kabupaten-jember-2020.html>>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 'Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2021-2023' <<https://jatim.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Jumlah+Penduduk+Menurut+Jenis+Kelamin+dan+Kabupaten%2FKota+Provinsi+Jawa+Timur+%28Jiwa%29%2C+2021-2023&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tam>>
- Bahri, Syaiful, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ed. by Erang Risanto (Malang: Penerbit Andi, 2018)
- Cristina, 'Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?', 2023

- Febiana, Hestin Sri Widiawati, and Andy Kurniawan, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri', *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5.3 (2020), 1–12
- Firli, Irfani, 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4.3 (2021)
- Hantono, H, and R. F. S Sianturi, 'Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan', *JAP: Jurnal Audit Dan Perpajakan*, 1.1 (2021), 27–40
- Herawati, Juvita Dwi, and Shandy Marsono, 'Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Klaten)', *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2020), 99–109 <<https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/776>>
- Hidayah, Muhammad Sofwan, 'Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan' (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Juliantari, Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar', *Jurnal Kharisma*, 3.1 (2021), 128–39
- Kowel, Viva A. A., Lintje Kalangi, and Steven J. Tangkuman, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7.3 (2019), 4251–60
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016)
- Masruroh, Nikmatul, Ilfanny Dwi Azalia, Miftahul Jannah, and Julia Citra Anggraini, 'Literasi Sistem Transformasi Digital Dalam Optimalisasi Layanan Nasabah', *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2.1 (2024), 406–12 <<https://doi.org/10.62085/jms.v2i1.88>>
- Nadia, Aprita Tri, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,



Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)', *Journal of Accounting* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Pratiwi, Ana, Kuni Zakiiyyatul Laila, and Daru Anondo, 'Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2.1 (2022), 60–71 <<https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3313>>

Pratiwi, Ana, Feni Aulia Rizky, Muhammad Ivan Endriansyah, and Moch Diki Ramadhani, 'Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) Atas Perawatan Jasa Cuci Kereta Dan OTC (On Trip Cleaning) Pada PT. KAI Persero Daerah Operasi IX Jember', *Academia.Edu*, 23.PPh 23, 1–10 <<https://www.academia.edu/download/102306495/diki.pdf>>

Pratiwi, Ana, Lilis Wahyuningsih, and Shofia Auliya Az, 'Sosialisasi Pelayanan Dan Produk Di Bank Muamalat KCP Banyuwangi', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Lingkungan (JPML)*, 2.1 (2023), 7 <<https://doi.org/10.30587/jpml.v2i1.5686>>

Putra, Afuan Fajrian, 'Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem', *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 7.1 (2020)

Putra, I Dewa Agung Krisna, 'Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Serta Kebijakan Intensif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar' (Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, 2022)

Rahayu, Siti kurnia, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017)

Rahayu, Sri Kurnia, *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Robbins, Steppen P., and Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta Salemba Empat, 2008) <<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=101879&pRegionCode=UN TAR&pClientId=650>>

Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2013)

Suandy, Erly, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008)



Suparman, *Gaya Mengajar Yang Menyenangkan Siswa* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010)

Trisnayanti, Ni Komang Fera, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati, 'Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan', *Jurnal Kharisma Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 4.1 (2022), 411–19 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4584>>

Tukiran, Taniredja, and Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Wahyuningrum, Putri Zalsa Bella, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Semarang)', 2022 (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

Zahira, Dhania Febby, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati' (Skripsi, Departemen Bisnis dan Keuangan Universitas Diponegoro Semarang, 2023)



### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jember	1. Kepatuhan Wajib Pajak	a) Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan b) Wajib pajak melapor SPT dengan benar dan tepat waktu c) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun d) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena pajak	1. Pendekatan dan jenis penelitian a) Pendekatan kuantitatif b) Jenis penelitian asosiatif kausal  2. Populasi dan sampel a) Populasinya wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Jember. b) Sampel penelitian menggunakan teknik <i>accidental sampling</i>  3. Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan kuisioner  4. Analisis data a) Deskriptif statistik b) Uji validitas	1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
	2. Pengetahuan Wajiuib Pajak	a) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak b) Pengetahuan wajib		

		<p>pajak terhadap fungsi pajak</p> <p>c) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan</p>	<p>c) Uji reliabilitas</p> <p>d) Uji asumsi klasik</p> <p>1) Uji normalitas</p> <p>2) Uji multikolinieritas</p> <p>3) Uji heteroskedastisitas</p> <p>e) Uji koefisien determinan</p>	
3. Sanksi Pajak		<p>a) Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi</p> <p>b) Sanksi administrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan</p> <p>c) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak</p> <p>d) Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang</p>	<p>f) Uji regresi linier berganda</p> <p>g) Uji t</p> <p>h) Uji F</p>	

		ditoleransi		
	4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	<p>a) Modernisasi sistem perpajakan telah berbasis teknologi informasi</p> <p>b) Modernisasi sistem perpajakan efektif dan efisien</p> <p>c) Modernisasi sistem administrasi pajak sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak</p> <p>d) Modernisasi sistem perpajakan telah memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak</p>		



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ivan Maulana Akbar  
Nim : 204105020066  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da ada klaim dari pihaklain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 05 November 2024

Saya yang menyatakan



IVAN MAULANA AKBAR  
NIM. 204105020066

## Lampiran Pertanyaan Kuisioner

### A. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai undang-undang yang berlaku
2. Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu
3. Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan
4. Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor

### B. Pengetahuan Wajib Pajak

1. Saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor
2. Saya mengetahui fungsi pajak sebagai pembangunan daerah
3. Jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan denda

### C. Sanksi Pajak

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak
2. Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka saya akan terkena sanksi administrasi
3. Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar
4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran

### D. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

1. Adanya modernisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya
2. Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat mempermudah pembayaran pajak karena diakses melalui internet

3. Sistem administrasi perpajakan modern (Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, *e-samsat* dan Samsat *Corner*) telah memberikan banyak manfaat
4. Pembayaran secara *online* (*teller bank*, *m-banking*, ATM) memudahkan wajib pajak karena efisien waktu







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-8650/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember**

Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Ivan Maulana Akbar  
 NIM : 204105020066  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jember

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 20 Agustus – 20 September 2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

<https://jemberkab.bps.go.id/indicator/17/64/1/perkembangan-banyaknya-kendaraan-menurut-jenis-kendaraan-berdasarkan-catatan-kepolisian-resort-jember.html>

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



A.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ivan Maulana Akbar  
NIM : 204105020066  
Semester : IX (sembilan)  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jember

telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 20 Agustus-20 Septembeter 2024 dengan mengambil data dari :

<https://jemberkab.bps.go.id/indicator/17/64/1/perkembangan-banyaknya-kendaraan-menurut-jenis-kendaraan-berdasarkan-catatan-kepolisian-resort-jember.html>

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 September 2024

A.n. Dekan  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

M.F. Hidayatullah

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	22 Agustus 2024	Penyerahan surat izin penelitian	
2.	26 Agustus 2024	Penyebaran kuisisioner kepada masyarakat	
3.	2 September 2024	Konsultasi hasil kuisisioner kepada dosen pembimbing	
4.	5 September 2024	Penyebaran kuisisioner kedua untuk memenuhi jumlah responden	
5.	12-20 September 2024	Pengolahan data hasil penelitian	

Jember, 23 September 2024

Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



AMINATUS ZAHRIYA, S.E, M.SI  
NIP. -198907232019032012

## Lampiran Hasil Uji

Lampiran I hasil uji statistik deskriptif

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	4.00	20.00	15.5100	2.02257
Pengetahuan Wajib Pajak	100	3.00	15.00	10.7900	2.34540
Sanksi Pajak	100	4.00	20.00	16.1000	2.59565
Modernisasi Administrasi Perpajakan	100	4.00	20.00	16.7500	2.59905
Valid N (listwise)	100				

Lampiran II hasil uji validitas

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	56.5000	62.616	.732	.917
Y.2	56.7800	62.678	.588	.921
Y.3	56.6000	62.505	.741	.917
Y.4	56.6400	62.394	.681	.918
X1.1	57.1300	62.155	.584	.921
X1.2	57.2400	59.336	.648	.920
X1.3	57.7200	62.547	.491	.925
X2.1	56.8800	61.561	.690	.918
X2.2	57.0600	62.986	.583	.921
X2.3	56.8800	61.905	.686	.918
X2.4	56.9200	62.317	.624	.920
X3.1	56.9400	62.219	.668	.919
X3.2	56.8300	61.435	.689	.918
X3.3	56.6800	61.957	.690	.918
X3.4	56.6400	62.394	.681	.918

## Lampiran III hasil uji reliabilitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan Wajib Pajak	43.6400	41.283	.588	.810
Pengetahuan Wajib Pajak	48.3600	37.122	.631	.790
Sanksi Pajak	43.0500	32.593	.719	.748
Modernisasi Administrasi Perpajakan	42.4000	33.394	.683	.767

## Lampiran IV hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.62489630
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.067
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.704
Asymp. Sig. (2-tailed)		.705

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran V hasil uji multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.105	1.177		6.035	.000		
Pengetahuan Wajib Pajak	.103	.092	.119	1.114	.268	.589	1.697
Sanksi Pajak	.181	.091	.233	1.998	.049	.496	2.017
Modernisasi Administrasi Perpajakan	.261	.084	.336	3.120	.002	.580	1.725

a. Dependent Variable: Kewajiban Wajib Pajak

## Lampiran VI hasil uji heteroskedastisitas

## Correlations

	Pengetahuan Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Modernisasi Administrasi Perpajakan
Spearman's rho			
Pengetahuan Wajib Pajak	Correlation Coefficient 1.000	.590**	.452**
	Sig. (2-tailed) .000	.000	.000
	N 100	100	100
Sanksi Pajak	Correlation Coefficient .590**	1.000	.528**
	Sig. (2-tailed) .000	.000	.000
	N 100	100	100
Modernisasi Administrasi Perpajakan	Correlation Coefficient .452**	.528**	1.000
	Sig. (2-tailed) .000	.000	.000
	N 100	100	100

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran VII hasil uji koefisien determinan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 <sup>a</sup>	.355	.334	1.65009

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kewajiban Wajib Pajak

## Lampiran VIII hasil uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.105	1.177		6.035	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	.103	.092	.119	1.114	.268
	Sanksi Pajak	.181	.091	.233	1.998	.049
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.261	.084	.336	3.120	.002

a. Dependent Variable: Kewajiban Wajib Pajak

## Lampiran IX hasil uji F

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143.601	3	47.867	17.580	.000 <sup>a</sup>
	Residual	261.389	96	2.723		
	Total	404.990	99			

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kewajiban Wajib Pajak



### Lampiran Hasil Kuisioner

Responden	Y					X1				X2					X3				
	P1	P2	P3	P4	Total	P5	P6	P7	Total	P8	P9	P10	P11	Total	P12	P13	P14	P15	Total
R1	4	4	4	5	17	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
R2	4	4	4	4	16	4	3	4	11	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15
R3	4	5	5	4	18	3	4	4	11	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
R4	4	4	3	5	16	3	1	4	8	5	4	4	1	14	3	5	5	5	18
R5	5	5	5	5	20	5	4	3	12	5	4	4	4	17	5	5	5	5	20
R6	5	5	5	5	20	5	5	3	13	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R7	5	4	5	5	19	4	4	2	10	5	4	4	4	17	4	4	4	5	17
R8	5	5	5	5	20	4	5	3	12	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R9	5	3	5	5	18	3	5	3	11	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R10	5	5	5	3	18	4	4	4	12	4	4	3	4	15	4	4	4	3	15
R11	4	3	4	4	15	2	4	2	8	5	3	4	4	16	4	4	4	4	16
R12	5	5	5	4	19	4	4	3	11	4	4	5	4	17	3	4	4	4	15
R13	5	3	4	3	15	2	1	1	4	3	3	5	5	16	5	3	3	3	14
R14	5	4	4	5	18	4	5	4	13	4	3	5	5	17	4	5	5	5	19
R15	4	3	4	4	15	3	3	2	8	4	4	4	4	16	4	3	5	4	16
R16	5	5	5	4	19	4	4	4	12	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
R17	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20
R18	5	5	5	4	19	4	4	4	12	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
R19	5	5	5	5	20	2	3	3	8	3	3	4	5	15	4	4	5	5	18
R20	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R21	5	4	4	5	18	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
R22	5	5	5	5	20	5	4	4	13	4	2	3	4	13	4	5	5	5	19
R23	5	4	4	4	17	2	4	2	8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R24	4	5	5	3	17	4	3	4	11	4	4	3	3	14	3	3	3	3	12



R25	4	4	4	5	17	3	3	4	10	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
R26	5	5	5	5	20	3	3	3	9	3	4	3	2	12	5	5	4	5	19
R27	4	4	4	4	16	3	4	3	10	4	3	4	4	15	3	4	4	4	15
R28	4	3	4	5	16	4	4	4	12	2	4	2	4	12	5	5	3	5	18
R29	4	4	4	4	16	4	4	3	11	3	4	4	4	15	4	3	3	4	14
R30	5	5	5	5	20	4	4	3	11	5	4	4	4	17	4	5	5	5	19
R31	4	5	4	4	17	4	3	4	11	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
R32	4	4	4	4	16	4	2	4	10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R33	5	4	5	4	18	4	5	4	13	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
R34	4	4	4	4	16	4	5	3	12	5	3	4	4	16	5	5	5	4	19
R35	5	5	5	5	20	5	5	3	13	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R36	5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R37	3	3	3	5	14	3	3	3	9	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18
R38	4	4	4	4	16	4	3	2	9	4	3	3	3	13	3	4	4	4	15
R39	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R40	4	4	4	4	16	4	3	3	10	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
R41	5	5	5	5	20	4	4	2	10	5	4	5	4	18	4	5	5	5	19
R42	5	5	5	5	20	4	4	2	10	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20
R43	3	3	3	4	13	4	4	2	10	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
R44	4	4	4	4	16	3	3	2	8	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15
R45	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R46	5	5	5	5	20	5	4	5	14	5	4	5	4	18	4	5	5	5	19
R47	5	5	5	4	19	5	5	5	15	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17
R48	5	5	5	4	19	5	4	4	13	5	4	5	5	19	4	5	4	4	17
R49	5	4	4	5	18	3	5	3	11	5	5	5	5	20	4	5	4	5	18
R50	5	5	5	5	20	4	4	4	12	4	4	5	4	17	4	4	5	5	18
R51	4	4	4	5	17	3	5	4	12	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20

R52	5	5	5	4	19	4	3	4	11	4	4	5	5	18	5	4	3	4	16
R53	4	4	4	3	15	3	4	3	10	5	4	4	4	17	4	4	4	3	15
R54	4	3	4	4	15	4	3	4	11	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16
R55	4	3	4	3	14	3	4	2	9	4	4	5	4	17	4	3	5	3	15
R56	5	5	5	5	20	5	5	4	14	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R57	5	5	4	5	19	4	3	2	9	4	4	4	4	16	3	5	5	5	18
R58	4	4	4	4	16	3	2	4	9	3	4	3	4	14	2	4	4	4	14
R59	4	4	4	4	16	4	3	2	9	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
R60	4	4	4	4	16	4	3	2	9	4	3	4	4	15	3	4	4	4	15
R61	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
R62	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R63	4	3	4	4	15	3	3	3	9	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R64	5	5	5	4	19	5	3	2	10	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15
R65	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	4	4	18	4	5	5	5	19
R66	4	4	4	5	17	4	5	4	13	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18
R67	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R68	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17
R69	5	5	5	5	20	5	4	4	13	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18
R70	5	3	5	5	18	5	5	3	13	5	5	5	5	20	5	3	5	5	18
R71	4	3	4	4	15	4	2	3	9	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16
R72	5	5	5	5	20	4	5	4	13	5	5	5	4	19	4	5	5	5	19
R73	5	5	5	5	20	5	5	2	12	5	1	5	5	16	5	5	5	5	20
R74	5	3	5	5	18	5	5	5	15	3	4	4	5	16	5	5	5	5	20
R75	4	3	4	5	16	4	4	4	12	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17
R76	5	4	4	5	18	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18
R77	5	4	5	4	18	5	4	4	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R78	4	4	4	4	16	4	4	2	10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

R79	5	5	5	4	19	5	4	4	13	4	5	4	4	17	4	4	5	4	17
R80	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
R81	5	3	4	5	17	3	4	3	10	4	4	4	4	16	3	3	5	5	16
R82	5	5	5	5	20	4	5	4	13	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R83	4	3	4	3	14	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14
R84	5	5	5	4	19	4	1	3	8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R85	4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	4	3	3	13	3	3	4	4	14
R86	5	4	4	5	18	4	4	3	11	5	4	4	4	17	4	3	4	5	16
R87	5	5	5	3	18	4	5	4	13	5	5	5	4	19	5	3	3	3	14
R88	4	4	4	4	16	1	1	1	3	3	3	4	3	13	3	2	4	4	13
R89	4	4	3	4	15	4	4	3	11	4	3	3	3	13	3	3	3	4	13
R90	4	4	4	4	16	3	2	2	7	2	4	3	3	12	3	3	3	4	13
R91	4	4	4	4	16	3	3	2	8	3	3	3	4	13	3	3	3	4	13
R92	3	4	4	3	14	4	4	3	11	4	4	3	4	15	3	3	4	3	13
R93	4	4	4	4	16	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
R94	5	5	5	5	20	5	5	4	14	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
R95	5	5	5	4	19	3	4	3	10	5	4	4	5	18	5	5	4	4	18
R96	5	5	5	5	20	4	3	3	10	4	3	4	3	14	5	5	5	5	20
R97	4	4	4	5	17	2	2	2	6	4	3	4	3	14	5	5	5	5	20
R98	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
R99	4	3	4	5	16	4	2	2	8	3	3	4	4	14	4	5	5	5	19
R100	5	3	4	3	15	4	2	2	8	4	4	4	5	17	3	3	3	3	12



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ivan Maulana Akbar  
 NIM : 204105020066  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Judul : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Jember, 7 November 2024

Operator Aplikasi DrillBit  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Luluk Musfiroh





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ivan Maulana AKbar

NIM : 204105020066

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 4 November 2024  
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

A.n. Dr. Sofiah, M.E.  
 NIP. 1991051521932005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



**BIODATA PENULIS**

Nama : Ivan Maulana Akbar  
 NIM : 204105020066  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 20 Mei 2002  
 Alamat : Jl. Pb. Sudirman gang hijau Tanggul Kulon Kec. Tanggul, kab. Jember  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Telp/Hp : 081231546870  
 Email : [ivanmaulanaakbar256@gmail.com](mailto:ivanmaulanaakbar256@gmail.com)

Riwayat pendidikan :

1. TK Aisyah Bustanul Athfal
2. SDN Tanggul Kulon 03
3. SMPN 3 Tanggul
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember
5. UIN Kiai Haji Achmad siddiq Jember